

PENERAPAN NORMA HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN JAMINAN FIDUSIA

Irwan Kusuma

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Veteran Negeri
Jakarta
e-mail : irwangopal@gmail.com

Abstrak

Fidusia adalah lembaga jaminan bagi benda-benda bergerak yang berbeda dengan lembaga gadai karena penguasaan benda obyek jaminan tetap berada ditangan debitur. Sebelum diundangkannya Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, keberadaan praktek fidusia di Indonesia dilandaskan kepada yurisprudensi dari putusan *Bier Broumerij Arrest*, di mana hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan seperti tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penerapan jaminan fidusia yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta cara untuk meningkatkan fungsi dan peran lembaga jaminan fiducia melalui penerapan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum jaminan fiducia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Diperoleh kesimpulan bahwa Dengan lahirnya undang-undang tentang Jaminan Fidusia, maka penerapan jaminan fidusia dapat dikatakan sudah lebih terjamin dan lebih tegas diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk membantu meningkatkan fungsi dan peran lembaga jaminan fiducia melalui penerapan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum jaminan fiducia, perlu adanya pembaharuan hukum, meningkatkan aktivitas lembaga penerapan sanksi,serta memerlukan adanya sosialisasi mengenai apa-apa saja perbuatan yang akan dianggap sebagai tindak pidana fidusia, supaya membantu meningkatkan fungsi dan peran lembaga jaminan fidusia dalam menegakkan hukum dan mengurangi tindak pidana dalam kegiatan fidusia.

Kata Kunci: Fidusia, Tindak Pidana, Jaminan

**(THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL NUMBERS TO THE
VIOLATION OF FIDUSIA GUARANTEE)**

Irwan Kusuma

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Veteran Negeri
Jakarta
e-mail : irwangopal@gmail.com

Abstract

Fiduciary is a collateral institution for movable objects, which is different from a pawning institution because control of the collateral object remains in the hands of the debtor. Prior to the promulgation of the Law on Fiduciary Security, the existence of fiduciary practices in Indonesia was based on the jurisprudence of the Bier Broumerij Arrest decision, where the judge for the first time ratified the existence of such a guarantee mechanism. This study aims to discuss the application of fiduciary guarantees in accordance with applicable statutory provisions as well as ways to improve the function and role of the fiduciary guarantee institution through the application of criminal law against perpetrators of violations of the fiduciary guarantee law. This research is a normative juridical study, using a statute approach. The conclusion is that with the issuance of the law on Fiduciary Security, the application of fiduciary guarantees can be said to have been more secure and more strictly regulated in accordance with the provisions of the applicable laws. Then it has been explained previously that in order to help improve the function and role of the fiducia guarantee institution through the application of criminal law against perpetrators of violations of the fiduciary guarantee law, it is necessary to reform the law, increase the activity of the sanctioning institution, and require socialization of what actions will be considered as fiduciary crime, in order to help improve the function and role of the fiduciary guarantee institution in enforcing the law and reducing criminal acts in fiduciary activities.

Keyword: *Fiduciary, Crime, Guarantee*